



RENCANA AKSI
PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2024



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN

Jl. Gatot Subroto Nomor 2 Kediri - Tabanan Telp (0361) 811171

2024

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum | 3 |
| 1.3 Tujuan..... | 3 |
| BAB II RENCANA AKSI..... | 4 |
| 2.1 Sasaran Strategis..... | 4 |
| 2.2 Arah Kebijakan..... | 4 |
| 2.3 Program dan Kegiatan | 5 |
| 2.4 Matrik Rencana Aksi | 5 |
| BAB III PENUTUP | 11 |
| 3.1 Kesimpulan | 11 |
| 3.2 Saran | 11 |
| Lampiran | |

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Perencanaan pembangunan telah diarahkan untuk adanya sinergisitas prioritas pembangunan pusat dan daerah. Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terkordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dengan baik.

Pemerintah pusat telah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2040, dimana dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) melalui tiga strategi yaitu : 1). Rencana aksi dalam bentuk mitigasi bencana, 2).Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dalam bentuk rencana kontigensi, dan 3). Rencana pemulihan prabencana dalam bentuk rencana rekuntruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

Prioritas pembangunan Provinsi Bali telah sinergis dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan, sehingga dalam kebencanaan sesuai prioritas ketiga yakni jaminan sosial dan ketenagakerjaan maka pemerintah daerah terus berinovatif dalam mewujudkan daerah aman dan nyaman sehingga perekonomian dan inventasi dapat berkembang.

Perencanaan kebencanaan di Kabupaten Tabanan telah disusun sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 yang disenergiskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2021-2026. Dokumen perencanaan kinerja tersebut telah mengamanahkan untuk menjadikan Tabanan sebagai kabupaten tangguh bencana dimulai dari desa.

Kabupaten Tabanan adalah satu dari sembilan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali dengan wilayah terluas kedua setelah Kabupaten Buleleng dengan topografi yang *nyegara gunung* atau mulai dari laut sampai dengan pegunungan. Kondisi yang demikian itu menyebabkan berpotensi terkena ancaman bencana. Pada umumnya resiko bencana yang terjadi di Kabupaten Tabanan meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami), bencana akibat hydrometeorologi (banjir, tanah longsor, angin puting beliung), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman, ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat sengketa tapal batas, konflik adat, dan konflik akibat sistem politik.

Mengingat Kabupaten Tabanan rawan akan bencana, maka pemerintah Kabupaten Tabanan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Tabanan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan tanggal 28 Nopember 2011 dan dirubah Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dengan melaksanakan tugas utama dalam penanggulangan bencana dengan menganut prinsip-prinsip: menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, hidup harmoni dengan bencana (*living in harmony with disaster*) dan memperhatikan *local wisdom* serta potensi-potensi yang tersedia. Potensi yang tersedia merupakan sarana yang harus didayagunakan untuk mengurangi dampak ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan guna dikonversikan dan diformulasikan menjadi peluang, dan menjamin pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah menetapkan strategi dalam manajemen bencana dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang dihadapi sehingga dapat melakukan inovasi program dan kegiatan prioritas. Adapun isu strategis yang dihadapi dan prioritas ditangani di tahun 2024 yaitu : 1). Pelayanan informasi (edukasi) rawan bencana kepada multi pihak, 2). Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana untuk investasi pembangunan, 3). Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana untuk pulih lebih cepat (*resilien*) .

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berupaya menangani isu staretgis yang dihadapi dengan program prioritas baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD agar multi pihak (*stakeholder*) semuanya dapat memenuhi harapan pemerintah pusat maupun daerah untuk menjadi tanggap, siaga, dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana.

Peran birokrasi yang akuntabel dalam melaksanakan amanah RPJMD Semesta Berencana khususnya dalam manajemen bencana menjadi tuntutan yang harus segera direspon oleh semua *stakeholder*. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010-2025. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan *good and clean government* yang telah ditetapkan melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi. Dengan demikian, pemerintah melakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, dimana birokrasi akan menjadi tulang punggung perubahan yang didukung oleh aparatur berakhlak.

Penyusunan rencana aksi daerah dalam penanggulangan bencana harus didasari atas isu-isu strategis yang terus berkembang, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang dituangkan dalam rencana staretgis perangkat daerah. Oleh karena

itu maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkala melakukan pemutahiran rencana aksi penanggulangan bencana.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan rencana aksi penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan Tahun 2024 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah .
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
- e. Peraturan daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
- f. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 46) ;

1.3. Tujuan.

Tujuan dari penyusunan dokumen perencanaan ini adalah memberikan informasi rencana aksi penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan tahun 2024 dan arah kebijakan strategis pemenuhan SPM bidang urusan trantibun di sub urusan bencana.

II. RENCANA AKSI

2.1 Sasaran Strategis

RPJMD Semesta Berencana menjadi acuan dalam perencanaan rencana aksi yang selaras dengan asta program. BPBD melaksanakan amanah :

- Misi pertama : Merwujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam prikehidupan (Aman)
- Tujuan pertama : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam prikehidupan
- Sasaran pertama : Terjaminnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga
- Asta program ketujuh : pembangunan kesejahteraan rakyat.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan, dari tujuan terwujudnya Tabanan yang tangguh dalam menghadapi bencana dilanjutkan dengan sasaran yang ingin dicapai adalah pengurangan risiko bencana.

Beranjak dari tujuan dan sasaran di atas, maka disusun strategi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.
- b. Respon cepat terhadap penanganan bencana.
- c. Melakukan Verifikasi dan monitoring bencana sehingga bansos tepat sasaran.
- d. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan sistem monev kinerja.

2.2 Arah Kebijakan

Kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan menjadi dasar pilihan tindakan yang dapat diambil oleh pemanku kepentingan untuk meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Tabanan dengan berdasarkan kajian risiko di Kabupaten Tabanan. Adapun arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan sebagai berikut;

- a. Pengurangan risiko bencana dengan pembentukan destana, sosialisasi, diklat kebencanaan, di wilayah Kabupaten Tabanan.
- b. Melayani masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tepat waktu dalam pencarian dan evakuasi korban bencana.
- c. Mengembalikan fungsi obyek-obyek vital yang rusak akibat bencana.
- d. Melakukan bintek guna meningkatkan kualitas kinerja.

2.3 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi RPJMD Tahun 2021-2026.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dari strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

2.4 Matrik Rencana Aksi

Adapun rencana aksi program dan kegiatan prioritas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan terdiri dari 1 (dua) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan 1 (satu) program penanggulangan bencana yang terdistribusi dalam 10 (sepuluh) kegiatan prioritas seperti berikut ini.

Tabel Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2023

| No | Program/Kegiatan | Kegiatan Prioritas | Rencana Aksi Kegiatan | Instansi |
|----|--|--|---|---|
| A | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| a | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Musrenbang | Menyerap usulan, data dan informasi kebencanaan dari masyarakat rawan bencana | BNPB, BPBD, Bappeda, Bakeuda |
| | | Kajian partisipatif | Melakukan analisis prioritas kebutuhan masyarakat | BPBD, Bappeda, Bakeuda |
| | | Kajian teknokratik | Melakukan Focus Group Discussion dan Forum OPD | BPBD, Bappeda, Bakeuda |
| | | Kajian pokok-pokok pikiran dewan | Mengikuti rapat kerja dan menyusun telaah staf perencanaan dan anggaran | BPBD, Bappeda, Bakeuda, Setwan |
| b | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah | Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi kebencanaan urusan wajib dasar bidang kebencanaan | BNPB, BPBD, Bappeda, Bakeuda, Setda, BPS, Satpol PP |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | Penyusunan laporan kinerja perangkat daerah urusan wajib dasar bidang kebencanaan | Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi kinerja pelayanan administrasi dan pelayanan publik penanggulangan bencana | BNPB, BPBD, Bappeda, Bakeuda, Setda, BPS, Satpol PP, Camat |
| 2 | Administrasi keuangan PD | | | |
| a | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Laporan gaji Tunjangan ASN Tunjangan kinerja Laporan honorarium | Penatausahaan gaji Penatausahaan tunjangan Penatausahaan TPP Penatausahaan honorarium | Bakeuda BPBD Inspektorat |
| b | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | LRA Laporan pajak Laporan KIR, KIB Laporan persediaan | Pelaporan LRA Pelaporan pajak Pelaporan KIR, KIB Pelaporan persediaan | Bakeuda BPBD Inspektorat |
| 3 | Administrasi umum PD | | | |
| a | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan peralatan listrik dan penerangan kantor | Identifikasi dan pemenuhan peralatan listrik dan penerangan kantor | Bakeuda, BPBD, rekanan |
| b | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Penyediaan alat kebersihan kantor | Identifikasi dan pemenuhan alat kebersihan kantor | Bakeuda, BPBD, rekanan |
| c | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan kelengkapan upacara keagamaan | Identifikasi dan pemenuhan kelengkapan upacara keagamaan | Bakeuda, BPBD, rekanan |
| d | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Identifikasi dan pemenuhan penjilidan dan foto copy dokumen | Bakeuda, BPBD, rekanan |
| e | Penyediaan bahan material | Penyediaan bahan material kantor | Identifikasi dan pemenuhan ATK, kertas, tinta printer | Bakeuda, BPBD, rekanan |
| f | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Mengikuti rakor luar daerah | Memenuhi undangan rakor instansi pusat | Bakeuda, BPBD, rekanan |
| g | Penatausahaan arsip dinamis SKPD | - | - | Tidak dapat anggaran |
| 4 | Penyediaan jasa penunjang urusan PD | | | |
| a | Penyediaan jasa surat menyurat | Penyediaan materai untuk dokumen PD | Pengelolaan penggunaan materai sesuai kebutuhan prioritas | Bakeuda, BPBD, rekanan |
| b | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran listrik, air, telepon, internet | Pengelolaan listrik, air, telepon, internet sesuai kebutuhan prioritas | Bakeuda, BPBD, rekanan |
| c | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Pembayaran jasa tenaga non ASN dan kinerja Non ASN | Penatausahaan jasa non ASN, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian dan kinerja Non ASN | Bakeuda, BPBD, rekanan |
| 5 | Pengadaan BMD penunjang urusan PD | | | |
| a | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | - | - | Tidak dapat anggaran |
| 6 | Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD | | | |
| a | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Pemeliharaan kendaraan dinas layak operasional | Perbaikan dan pembayaran pajak kendaraan dinas Penyediaan BBM dan oil | Bakeuda, BPBD, rekanan |
| b | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Penyediaan suku cadang alat kerja | Identifikasi dan penyediaan suku cadang dan servis kendaraan, computer, printer | Bakeuda, BPBD, rekanan |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| B | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | |
| 1 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota | | | |
| a | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana) | Sosialisasi mitigasi bencana | Sosialisasi mitigasi bencana kepada aparaturnya dan masyarakat | BNPB, BPBD Camat Babinsa Babinkabtibmas. Forum PRB |
| | | | KIE pada Satuan Pendidikan Aman Bencana | BPBD, Forum PRB, Guru, Siswa |
| | | Penyebarluasan informasi daerah rawan bencana | Pemasangan peta, spanduk, baliho daerah rawan bencana | Aparat desa |
| 2 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | | |
| a | Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan | Penguatan desa tangguh bencana | FGD penguatan destana | BNPB, BPBD Camat Babinsa Babinkabtibmas |
| | | | Pembentukan relawan desa | BPBD, Babinsa, Babinkabtibmas |
| | | | Pengukuhan destana | BPBD, Perbekel |
| | | Penguatan IKD dan IRBI desa | Pendampingan instrument IKD dan IRBI desa | BPBD, Aparat desa, BPD |
| b | Penyusunan Rencana Kontijensi | Penyusunan rencana kontijensi per jenis bencana | FGD isu-isu strategis kebencanaan | Tidak dapat anggaran |
| | | | Renkon tsunami, Renkon gempa bumi, Renkon banjir, Renkon cuaca ekstim, Renkon tanah longsor | Tidak dapat anggaran |
| c | Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana | Simulasi dan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana | Simulasi dan gladi kesiapsiagaan | BNPB, BPBD, PMI, SAR, Relawan |
| | | Forum kesiapsiagaan menghadapi bencana | FGD kesiapsiagaan menghadapi bencana | BPBD, Forum PRB, guru, aparat desa |
| 3 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | |
| a | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Penyediaan peralatan penanganan darurat bencana | Penyediaan peralatan darurat bencana | BNPB, BPBD, TAPD Kabupaten |
| | | | Penyediaan peralatan pengungsi | BNPB, BPBD, TAPD Kabupaten |
| | | Penyediaan logistik kebencanaan | Penyediaan logistik kebencanaan | BNPB, BPBD, TAPD, CSR |
| | | | Distribusi logistik kebencanaan | BPBD, TRC, relawan |
| | | Penanganan bencana | Respon time kebencanaan | BNPB, BPBD, TRC, PMI, SAR, TNI, POLRI, Relawan |
| 4 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | |
| a | Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota | Survey lokasi wilayah terdampak bencana | Identifikasi dan survey lokasi wilayah terdampak bencana | BPBD, Aparat Desa, Pekaseh, Adat, dll |

| | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------------|
| | | | Pengolahan data, analisis dan penyusunan kajian pasca bencana | BPBD, Bappeda, Bakeuda |
| | | Koordinasi rehabilitasi dan rekontruksi | Koordinasi rencana rehabilitasi pasca bencana | BNPB, BPBD, Bakeuda, OPD terkait |
| | | | Koordinasi rencana rekontruksi pasca bencana | BNPB, BPBD, Bakeuda, OPD terkait |

Rencana aksi tahun 2024 atas program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota tersebut dijabarkan lebih terinci untuk memudahkan mengukur pencapaian kinerja di tahun perencanaan. Adapun rinciannya seperti berikut ini.

| No | Kegiatan / Sub kegiatan | Kegiatan Teknis | Rincian Kegiatan | Rencana Triwulanan | | | |
|----|---|---|--|--------------------|---------|---------|---------|
| | | | | I | II | III | IV |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | |
| a | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Musrenbang | Menyerap usulan, data dan informasi kebencanaan dari masyarakat rawan bencana | 1 dok | | | |
| | | Kajian partisipatif | Melakukan analisis prioritas kebutuhan masyarakat | 1 dok | | | |
| | | Kajian teknokratik | Melakukan Focus Group Discussion dan Forum OPD | 1 dok | | | |
| | | Kajian pokok-pokok pikiran dewan | Mengikuti rapat kerja dan menyusun telaah staf perencanaan dan anggaran | 1 dok | 1 dok | | |
| b | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah | Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi kebencanaan urusan wajib dasar bidang kebencanaan | 2 lapor | | | |
| | | Penyusunan laporan kinerja perangkat daerah urusan wajib dasar bidang kebencanaan | Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi kinerja pelayanan administrasi dan pelayanan publik penanggulangan bencana | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor |
| 2 | Administrasi keuangan PD | | | | | | |
| a | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Laporan gaji Tunjangan ASN Tunjangan kinerja Laporan honorarium | Penatausahaan gaji Penatausahaan tunjangan Penatausahaan TPP Penatausahaan honorarium | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor |
| b | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | LRA Laporan pajak Laporan KIR, KIB Laporan persediaan | Pelaporan LRA Pelaporan pajak Pelaporan KIR, KIB Pelaporan persediaan | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor |
| 3 | Administrasi umum PD | | | | | | |
| a | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan peralatan listrik dan penerangan kantor | Identifikasi dan pemenuhan peralatan listrik dan penerangan kantor | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|---------|---------|---------|---------|
| b | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Penyediaan alat kebersihan kantor | Identifikasi dan pemenuhan alat kebersihan kanto | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor |
| c | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan kelengkapan upacara keagamaan | Identifikasi dan pemenuhan kelengkapan upacara keagamaan | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor |
| d | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan barang cetakaan dan penggandaan | Identifikasi dan pemenuhan penjilidan dan foo copy dokumen | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor |
| e | Penyediaan bahan material | Penyediaan bahan material kantor | Identifikasi dan pemenuhan ATK, kertas, tinta printer | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor |
| f | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Mengikuti rakor luar daerah | Memenuhi undangan rakor instansi pusat | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor |
| g | Penatausahaan arsip dinamis SKPD | Tata kelola arsip dinamis dan arsip tetap | Penataan arsip dinamis dan arsip tetap | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor |
| 4 | Penyediaan jasa penunjang urusan PD | | | | | | |
| a | Penyediaan jasa surat menyurat | Penyediaan materai untuk dokumen PD | Pengelolaan penggunaan materai sesuai kebutuhan prioritas | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor |
| b | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran listrik, air, telepon, internet | Pengelolaan listrik, air, telepon, internet sesuai kebutuhan prioritas | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor |
| c | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Pembayaran jasa tenaga non ASN dan kinerja Non ASN | Penatausahaan jasa non ASN, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian Non ASN | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor |
| 5 | Pengadaan BMD penunjang urusan PD | | | | | | |
| a | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Pengadaan alat kerja | Pengadaan alat kerja kantor | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor |
| 6 | Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD | | | | | | |
| a | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perijinan kendaran dinas operasional atau lapangan | Pemeliharaan kendaraan dinas layak operasional | Perbaikan dan pembayaran pajak kendaraan dinas Penyediaan BBM dan oil | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor |
| b | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Penyediaan suku cadang alat kerja | Identifikasi dan penyediaan suku cadang dan servis kendaraan, computer, printer | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor |

Rencana aksi teknis tahun 2024 dalam program penanggulangan bencana dirinci seperti berikut ini.

| No | Kegiatan / Sub kegiatan | Kegiatan Teknis | Rincian Kegiatan | Rencana Triwulanan | | | |
|----|---|---|---|--------------------|---------|-----|----|
| | | | | I | II | III | IV |
| 1 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota | | | | | | |
| a | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana) | Sosialisasi mitigasi bencana | Sosialisasi mitigasi bencana kepada aparatur dan masyarakat | 1 lapor | | | |
| | | | KIE pada Satuan Pendidikan Aman Bencana | | 1 lapor | | |
| | | Penyebarluasan informasi daerah rawan bencana | Pemasangan peta, spanduk, baliho daeah rawan bencana | 10 kec | | | |
| 2 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Becana | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|---|---|---------|---------|---------|---------|
| a | Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan | Penguatan desa tangguh bencana | FGD penguatan destana | | | 1 lapor | |
| | | | Pembentukan relawan desa | | | 1 lapor | |
| | | Penguatan IKD dan IRBI desa | Pendampingan instrument IKD dan IRBI desa | | | 1 lapor | |
| b | Penyusunan Rencana Kontijensi | Penyusunan rencana kontijensi per jenis bencana | FGD isu-isu strategis kebencanaan | | | | 1 lapor |
| | | | Renkon banjir, Renkon cuaca ekstim, Renkon tanah longsor | | | | 1 dok |
| c | Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana | Simulasi dan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana | Simulasi dan gladi kesiapsiagaan | | 1 lapor | | |
| | | Forum kesiapsiagaan menghadapi bencana | FGD kesiapsiagaan menghadapi bencana | | 1 lapor | | |
| 3 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | | |
| a | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Penyediaan peralatan penanganan darurat bencana | Penyediaan peralatan darurat bencana | | 1 jenis | | |
| | | | Penyediaan peralatan pengungsi | | | | 1 jenis |
| | | Penyediaan logistik kebencanaan | Penyediaan logistik kebencanaan | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket |
| | | | Distribusi logistik kebencanaan | 10 kec | 10 kec | 10 kec | 10 kec |
| Penanganan bencana | Respon time kebencanaan | 24 jam | 24 jam | 24 jam | 24 jam | | |
| 4 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | | | | |
| a | Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota | Survey lokasi wilayah terdampak bencana | Identifikasi dan survey lokasi wilayah terdampak bencana | 10 kec | 10 kec | 10 kec | 10 kec |
| | | | Pengolahan data, analisis dan penyusunan kajian pasca bencana | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor |
| | | Koordinasi rehabilitasi dan rekontruksi | Koordinasi rencana rehabilitasi pasca bencana | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor |
| | | | Koordinasi rencana rekontruksi pasca bencana | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor | 1 lapor |

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan rencana aksi untuk menjabarkan RPJMD Semesta Berencana dan Renstra BPBD Tahun 2021-2026. Adapun rumusan rencana aksi daerah yang telah diselaraskan dengan perencanaan kinerja yaitu :

- a. Rencana aksi pada prabencana melalui 6 (enam) kegiatan prioritas dengan 10 rencana aksi
- b. Rencana aksi pada tanggap bencana melalui 3 (tiga) kegiatan prioritas dengan 5 rencana aksi
- c. Rencana aksi pada pasca bencana melalui 2 (dua) kegiatan prioritas dengan 4 rencana aksi
- d. Rencana aksi pada penunjang urusan pemerintahan melalui 6 (enam) kegiatan prioritas dengan 15 rencana aksi

3.2 Saran dan Langkah Antisipatif

Rencana aksi penanggulangan bencana baik di pelayanan kantor, prabencana, darurat bencana, dan pasca bencana akan dapat terlaksana dengan baik dan terukur apabila didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan dukungan anggaran.

Langkah antisipatif yang diajukan untuk penguatan kapasitas daerah dalam menurunkan indeks risiko bencana adalah kolaborasi semua *pentahelik* untuk menurunkan tingkat kerawanan dan bencana serta meningkatkan kapasitas daerah.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Smadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

Lampiran

RENCANA AKSI KINERJA DAN ANGGARAN DI BPBD TAHUN 2024

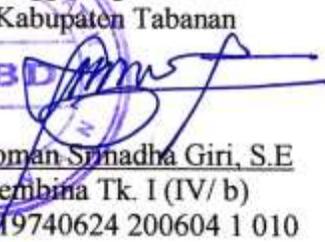
a. TUJUAN STRATEGIS

| No | Tujuan Strategis | Indikator | Satuan | Target Kinerja | | | Anggaran (Rp) | | | Penanggung jawab | |
|----|--|--|--------|----------------|-----------|--------|------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------------------------|
| | | | | Tahunan | Bulan | Target | Program | Tahunan | Bulan | | Target |
| 1 | Tabanan tanggung dimulai dari desa | Indeks Risiko Bencana | - | 147.42 | Januari | | Penanggulangan bencana | 4.290.580.430 | Januari | 308.075.693 | Bid PK, KL, RR, Sekretariat |
| 2 | Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD | Hasil Evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | % | 85 | Pebruari | | | | Pebruari | 426.022.182 | |
| | | | | | Maret | | | | Maret | 333.237.712 | |
| | | | | | April | | | | April | 547.061.214 | |
| | | | | | Mei | | | | Mei | 298.817.132 | |
| | | | | | Juni | | | | Juni | 304.944.432 | |
| | | | | | Juli | | | | Juli | 597.537.607 | |
| | | | | | Agustus | | | | Agustus | 300.930932 | |
| | | | | | September | | | | September | 296.161.432 | |
| | | | | | Oktober | | | | Oktober | 294.160.832 | |
| | | | | | Nopember | | | | Nopember | 294.801.532 | |
| | | | | | Desember | 147.42 | | | Desember | 288.831.728 | |

B. SASARAN STRATEGIS

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Satuan | Target Kinerja | | | Anggaran (Rp) | | | Penanggung jawab | |
|----|---|--|--------|----------------|-----------|--------|------------------------|---------------|-----------|------------------|---------|
| | | | | Tahunan | Bulan | Target | Program | Tahunan | Bulan | | Target |
| 1 | Pengurangan Risiko Bencana | Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan | % | 100.00 | Januari | 100.00 | Penanggulangan bencana | 4.290.580.430 | Januari | 308.075.693 | Bid PK, |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD | Nilai LKjIP perangkat daerah | A | 81 | Pebruari | 100.00 | | | Pebruari | 426.022.182 | Bid KL, |
| | | | | | Maret | 100.00 | | | Maret | 333.237.712 | Bid RR |
| | | | | | April | 100.00 | | | April | 547.061.214 | Sekret |
| | | | | | Mei | 100.00 | | | Mei | 298.817.132 | |
| | | | | | Juni | 100.00 | | | Juni | 304.944.432 | |
| | | | | | Juli | 100.00 | | | Juli | 597.537.607 | |
| | | | | | Agustus | 100.00 | | | Agustus | 300.930932 | |
| | | | | | September | 100.00 | | | September | 296.161.432 | |
| | | | | | Oktober | 100.00 | | | Oktober | 294.160.832 | |
| | | | | | Nopember | 100.00 | | | Nopember | 294.801.532 | |
| | | | | | Desember | 100.00 | | | Desember | 288.831.728 | |

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan


I Nyoman Srinadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

